

RANPERDA

2024

KEPDPRD NOMOR 16 /DPRD.LPG/III.01/2024, 3 HLM

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Persetujuan ini merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - Tujuan dari keputusan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap persetujuan DPRD dalam

menetapkan Ranperda menjadi Perda, serta memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2024 dan memiliki kekuatan hukum tetap untuk mendukung proses pengundangan Perda.